

## DPRD SULTENG MENILAI PERLU PELESTARIAN DAS DI SIGI CEGAH BANJIR



Sumber: <https://www.sulteng.antaranews.com>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai perlu ada upaya dan langkah bersama untuk melestarikan daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Sigi, sebagai langkah mencegah banjir. "Kalau kita lihat fakta lapangan karakter banjir bandang sungai di pegunungan yakni longsor batu dan kayu log, sedangkan di sungai di lembah luapan sedimentasi. Hal itu menunjukkan karakter krisis ekologis sungai," ucap Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, di Sigi, Minggu.

Berdasarkan peninjauan lapangan, Nilam menyebut aliran sungai di Kabupaten Sigi mengalami krisis ekologis yang berpotensi memicu bencana banjir bandang berulang dengan karakter longsor batu dan kayu log serta erosi. Nilam juga melihat langsung kondisi warga yang hidup di bantaran Sungai, mulai dari Bolapapu di Kulawi hingga warga korban banjir Bangsa dan Poi di Kecamatan Dolo Selatan cukup memprihatinkan. "Permukiman terparah di Bangsa yang dulu padat dan ramai. Sekarang berjejer rumah-rumah, sekolah, dan rumah ibadah tenggelam di dalam lumpur," sebut Nilam.

Nilam yang membawa rombongan BPBD dan Bina Marga langsung melakukan dialog mengenai kebutuhan mendesak warga. "Saya turut bersedih hati melihat masalah yang berlarut-larut ini. Saya sampaikan ke Komisi III untuk segera melaksanakan RDP," katanya di hadapan warga,

Ia menyebutkan bahwa sungai-sungai di Kabupaten Sigi rawan longsor dan banjir bandang. "Setelah melihat fakta, telah terjadi krisis ekologis sungai yang mengancam kehidupan warga dalam jangka panjang. Kita harus bersinergi untuk menemukan solusi" ungkapnya.

Usai kunjungan ke Kulawi, Ketua DPRD Sulteng bersama tim melanjutkan tinjauan lapangan ke kawasan hunian sementara pengungsi Poi Desa Bangsa Kabupaten Sigi.

Mereka yang tinggal di sini terbagi dalam dua gelombang pengungsian, pengungsi awal dari gempa 28 September 2018, dan menyusul korban banjir Desa Bangsa. Jumlah total warga yang mengungsi seluruhnya 242 kepala keluarga.

Saat ini mereka kekurangan pasokan air bersih. Mereka terpaksa membeli seharga Rp20.000 rupiah/tandon. "Terkait kebutuhan air bersih, tadi sudah saya sampaikan akan segera direalisasikan," ujar Nilam.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.antaraneews.com/berita/1210079/dprd-sulteng-nilai-perlu-pelestarian-das-di-sigi-cegah-banjir>, Minggu, 15 Desember 2019.
2. <https://sulteng.antaraneews.com/berita/88488/dprd-sulteng-menilai-perlu-pelestarian-das-di-sigi-cegah-banjir>, Senin, 16 Desember 2019.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan konservasi tanah dan air berdasarkan unit DAS (Daerah Aliran Sungai) secara terpadu.
2. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sehingga, pemerintah daerah wajib menyediakan dan menjaga pasokan pengungsi agar tetap terpenuhi.
3. Karena berdasarkan Pasal 8 huruf (a) bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap para pengungsi yang salah satunya adalah penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai bahwa sesuai dengan peraturan tersebut mengatur segala hal mengenai Daerah Aliran Sungai (DAS) mulai dari perencanaan, penentuan batas-batas definitif, pengelolaan hingga pelestarian monitoring DAS diatur secara terinci dalam PP tersebut.
5. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.